

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Organisasi secara keseluruhan baik itu organisasi pemerintahan maupun organisasi swasta/privat tentunya mempunyai tujuan yang ingin dicapai. Proses pencapaian tujuan organisasi tersebut dilakukan oleh orang-orang yang berada di dalam organisasi atau disebut sebagai anggota organisasi yang saling bekerja sama mengerahkan kemampuannya. Dalam mengerahkan kemampuan organisasi pasti tidak luput dari bantuan pimpinan.

Organisasi suatu sistem kerja sama yang saling berpengaruh antara dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan tertentu. Sebenarnya organisasi dapat dipandang sebagai wadah dan proses yang dimana memiliki tempat untuk melaksanakan aktivitas pengorganisasian oleh anggota organisasi itu sendiri. Organisasi dalam mencapai tujuannya sangat ditentukan oleh kemauan untuk kerjasama dengan menggerakkan seluruh potensi yang dimiliki oleh setiap orang untuk kerja organisasi, baik itu potensi yang bersifat material maupun non material, salah satu potensi antara lain yaitu sumber daya manusia. Dalam memaksimalkan kemampuan potensi sumber daya manusia pada suatu organisasi, yaitu sesuai kemampuannya dengan cara melakukan pembagian kerja sesuai porsi pada unit kerjanya, caranya dengan pimpinan memberi masukan seperti memberikan ide-ide yang dibutuhkan Pegawai, dari memberikan masukan seperti

itu pimpinan bisa untuk melakukan koordinasi karena koordinasi harus dilakukan dengan berjalannya aktivitas agar dapat mengetahui pekerjaan pegawai secara langsung.

Koordinasi suatu proses dimana pimpinan mengembangkan pola usaha kelompok secara teratur di antara bawahannya dan menjamin kesatuan tindakan di dalam mencapai tujuan bersama. Dalam sebuah organisasi koordinasi berguna untuk mengatur semua tugas, kegiatan dan pekerjaan yang lainnya pada satu tujuan yang sama yaitu tujuan dari pada organisasi dimana mereka bekerja, serta mencegah terjadinya kekacauan, kekaburan, dan *overlapping* dalam pekerjaan.

Kinerja pada dasarnya disebut sebagai hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Kinerja seseorang didasarkan pada kombinasi dari kemampuan, usaha, dan kesempatan yang dapat dinilai dari hasil kerjanya. Membentuk suatu kinerja pegawai yang profesional perlulah memiliki kemampuan dan pengetahuan untuk mendukung sistem kerja yang ada dalam suatu organisasi ketika dihadapkan pada suatu perubahan lingkungan.

Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bandung merupakan Instansi Pelaksanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Bandung yang dipimpin oleh Kepala Badan harus mencapai akuntabilitas instansi Pemerintah yang baik selaku unsur pembantu pemimpin, dan dituntut untuk selalu melakukan pembenahan kinerja yang diharapkan mampu meningkatkan peranan serta fungsi

Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bandung dalam Mewujudkan Persatuan dan Kesatuan Bangsa yang Kokoh Menuju Masyarakat yang Demokratis, Berdaya, Mandiri dan Sejahtera dengan sebaik-baiknya.

Peraturan Daerah nomer 08 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung BKBPM menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Peraturan Walikota Bandung Nomer 1406 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bandung maka Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bandung.

Berdasarkan peninjauan yang peneliti lakukan pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bandung, peneliti menemukan masalah dalam tingkat kinerja pegawai yang masih rendah atau belum sesuai dengan apa yang diharapkan, hal ini tersebut dapat dilihat dari indikator :

1. Kerjasama

Kerjasama yang dilakukan oleh sesama pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung masih rendah, hal ini bisa dilihat dalam menyelesaikan pekerjaan banyak pegawai yang tidak bisa bekerjasama. Contoh masih ada pegawai yang diberikan pekerjaan dan mengajak kerjasama ke pegawai sesama divisinya namun pegawai yang diajak kerjasama menolak secara halus.

## 2. Kemandirian

Kemandirian pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung masih rendah, hal ini dapat dilihat dari pegawai yang masih belum sadar akan tugas-tugasnya yang telah diberikan sehingga berimbas pada banyaknya tugas yang tidak selesai sesuai waktu yang telah ditentukan.

Penyebab yang di duga yaitu pengaruh koordinasi terhadap kinerja hal ini dapat dilihat dari lima ciri-ciri koordinasi yang memadai:

1. Kurangnya konsep kesatuan tindakan yang merupakan inti dari koordinasi, yaitu kurangnya kesatuan daripada usaha. Hal ini terlihat dari banyaknya pekerjaan yang menumpuk dan waktu yang terbuang yang seharusnya segera diselesaikan dan menggunakan waktu semaksimal mungkin tetapi karena kurangnya konsep kesatuan tindakan terjadi ketidaksesuaian dengan apa apa yang harus dicapai.
2. Kurangnya peraturan secara teratur daripada usaha kelompok, hal ini dapat dilihat dari koordinasi tumpang tindih pelaksanaan tugas selalu saja ada dan tidak dapat dihindari.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian yang lebih lanjut yang dituangkan ke dalam laporan penelitian yang berjudul **“PENGARUH KOORDINASI TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BANDUNG”**

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka penelitian merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Seberapa besar pengaruh koordinasi terhadap kinerja pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung?
2. Seberapa besar pengaruh koordinasi yang ditentukan melalui ciri-ciri koordinasi, meliputi : Tanggung jawab, adanya proses, pengaturan secara teratur daripada usaha kelompok, konsep kesatuan tindakan, dan tujuan koordinasi terhadap kinerja pegawai pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh peneliti yaitu sebagai berikut :

1. Memperoleh data dan menggambarkan informasi mengenai seberapa besar pengaruh koordinasi terhadap kinerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung
2. Menemukan dan menggambarkan informasi yang mengenai besar pengaruh koordinasi yang ditentukan oleh ciri-ciri koordinasi, meliputi : Tanggung jawab, adanya proses, pengaturan secara teratur daripada usaha kelompok, konsep kesatuan tindakan, dan tujuan koordinasi terhadap kinerja pegawai pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung.

## **1.4 Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan tidak hanya memiliki kegunaan yang bersifat teoritis tetapi juga mempunyai kegunaan yang bersifat praktis dan akademis.

Kegunaan yang dapat diharapkan dari penelitian ini, sebagai berikut:

### **1. Kegunaan Teoritis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan sumbangan pemikiran bagi perkembangan Administrasi Publik khususnya menyangkut permasalahan Koordinasi dan Kinerja Pegawai.

### **2. Kegunaan Praktis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan alternative pemecahan masalah yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Khususnya pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung.